

Pendidikan dan Karakteristik Pelaku UMKM Serta Kontribusinya Terhadap Perekonomian Nasional

Sirilius Seran

Fakultas Ekonomi Univesitas Timor

Email : siriliusseran@yahoo.co.id

Abstract : This research aimed to know the role of education and the characteristics of SMEs on the contributions to the economy. The research type is descriptive, used secondary data. Research result shown that education of SMEs relatively low. From 150 respondent of SMEs, 73 % were Junior High School graduation, or above it. While bachelor/diploma, 26 %, and 0,67 or 1 people was magister graduation. Lack of education has become a decisive factor low value added to national economic development.

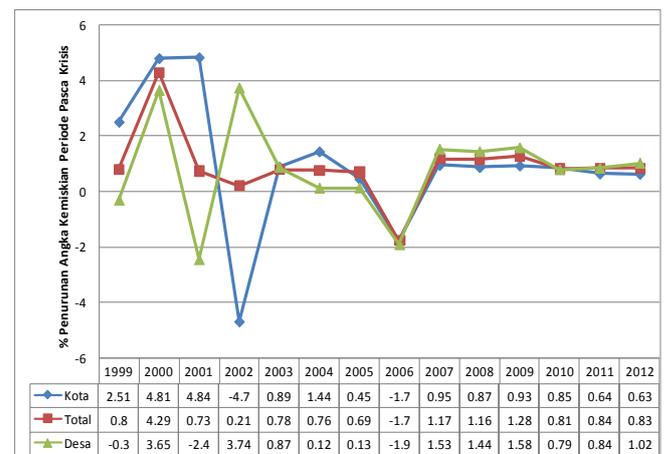
Keywords: Education, UMKM, and Economic Growth

Abstrak : Penelitian ini bertujuan mengetahui peranan pendidikan dan karakteristik pelaku UMKM terhadap kontribusinya terhadap perekonomian. Jenis penelitian bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan (formal) pelaku UMKM relatif rendah. Dari 150 responden pelaku UKM, 73 persennya berpendidikan SLTA, dan atau lebih rendah. Sedangkan Sarjana/Diploma, 26 persen, dan 0,67 atau 1 orang berpendidikan Magister. Rendahnya pendidikan ini telah menjadi faktor penentu rendahnya nilai tambah untuk pembangunan ekonomi nasional.

Kata Kunci : Pendidikan, UMKM, dan Pertumbuhan Ekonomi

Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, Indonesia mengalami pasang surut. Di jaman Orde Baru pertumbuhan output di sektor Industri Manufaktur melampaui beberapa Negara di kawasan Asean. Antara tahun 1990-1999 pertumbuhannya mencapai 9,9 persen melebihi dari Malaysia, Singapura, dan Thailand (Tambunan, 2003). Pada tahun 1996 pertumbuhan Ekonomi Indonesia pernah mencapai angka 7,8 persen (www.bps.g.id/aboutus.php), sebuah angka yang sangat fantastis. Disertai dengan laju inflasi yang relatif rendah(dibawah dua digit) Indonesia dijuluki sebagai macan Asia. Namun prestasi ini tidak bertahan lama, tahun 1998 Indonesia dihantam oleh krisis moneter yang bermula dari menurunnya nilai tukar mata uang Thailand terhadap dolar Amerika Serikat. Perusahaan-perusahaan besar yang mengadakan kekuatan investasi luar negeri mengalami krisis. Tahun 1998 inflasi mencapai angka 77,6% akibatnya pertumbuhan ekonomipun merosot menjadi -13,13 persen. Banyak perusahaan melakukan rasionalisasi dengan cara merumahkan bahkan memberhentikan sebagian pekerja.

Akibatnya pengangguran bertambah dari 4,70 persen (1997) menjadi 5,50 persen di tahun 1998. Angka kemiskinanpun tidak ketinggalan, membengkak menjadi 24,20 juta penduduk pada tahun 1998, meningkat dari 16,58 juta penduduk pada tahun sebelumnya (1997) (www.bps.g.id/aboutus.php).



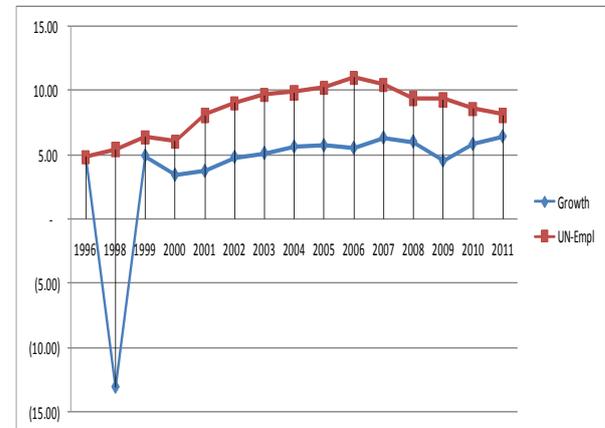
Sumber : BPS-Berbagai Tahun, Dalam Maipita, 2014.

Gambar 1 Persentase Penurunan Angka Kemiskinan Penduduk(Indonesia), 1999-2012

Angka kemiskinan penduduk pasca krisis, terus mengalami perlambatan (penurunan), seiring dengan makin membaiknya perekonomian nasional. Selama periode 1999-2012 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 20.91 juta jiwa atau 12.57 persen dari 49.50 juta jiwa (24.23 persen dari total penduduk) menjadi 28.59 juta jiwa (11.66 persen dari total penduduk pada September 2012). Namun pada tahun 2006 kembali mengalami kenaikan menjadi 17.75 juta jiwa, kemudian kembali menurun antara tahun 2007-2012. Persentasi penurunan angka kemiskinan menurut wilayah desa dan kota selama periode pasca krisis (1999-2012) ditampilkan dalam Gambar 1. Terlihat bahwa penurunan angka kemiskinan di wilayah pedesaan cenderung lebih cepat dibanding dengan penurunan yang terjadi di wilayah perkotaan.

Penurunan angka kemiskinan, disebabkan oleh 3 (tiga) macam hal : (1) membaiknya perekonomian, ditandai dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari tambahan output barang/jasa (PDRB) yang dihasilkan sektor ekonomi produktif. Makin besar PDRB, makin besar pula pertumbuhan ekonomi. Perteori, setiap tambahan 1 persen pertumbuhan ekonomi akan menyerap 400.000 orang tenaga kerja. Artinya pertumbuhan ekonomi menyerap angkatan kerja, mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Data yang dikeluarkan oleh BPS (2012) bahwa jumlah tambahan angkatan kerja selama periode 1996-2011 jauh melebihi dari kemampuan pertumbuhan ekonomi untuk menyerapnya. Bahkan selama periode tersebut persentase penduduk yang menganggur lebih besar dari pertumbuhan ekonomi (Gambar 2). (2) menurunnya Garis Kemiskinan (GK). Setiap tahun garis kemiskinan (GK) selalu berubah, mengikuti perkembangan harga (inflasi) atas barang-barang kebutuhan dasar (*basic need*) penduduk, karena itu masuk akal jika setiap wilayah kota, dan desa atau tiap provinsi mempunyai GK yang berbeda, dan (3) distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mestinya dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan dapat dinilai dengan

Koefisien Indeks Gini, nilainya antara 0-1. Nilai Indeks Gini jika makin mendekati 1 berarti ketimpangannya parah, dan sebaliknya.



Gambar 2 Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengangguran Tahun 1996-2011

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam sejarah memiliki nilai yang sangat strategis bagi perekonomian Nasional. Betapapun masih terbelit dengan berbagai persoalan struktural yang melekat pada dirinya. Kekurangan modal, minim teknologi, minim pengalaman, minim informasi tentang pasar, dan kurangnya kualitas SDM, merupakan persoalan yang tidak akan pernah tuntas. Kondisi inilah yang menyebabkan nilai tambah sektor ini terhadap perekonomian masih relatif rendah. Tahun 2003 UKM menyerap 99,45 persen dari total angkatan kerja tetapi ia hanya menghasilkan 58,3 persen nilai tambah. Akibatnya terdapat ketimpangan yang mencolok antara produktivitas di UKM dengan produktivitas usaha berskala besar yaitu 1: 129 (Ikhsan, 2004). Lebih lanjut dijelaskan bahwa jika produktivitas tenaga kerja di UKM meningkat 2 persen saja dari 0.8 persen (2004) maka nilai PDB akan meningkat lebih dari 50 persen dari PDB tahun 2003.

Pentingnya sektor ini tidak hanya berhubungan dengan penyerapan angkatan kerja yang dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan penduduk, melainkan dapat berhubungan dengan indikator ekonomi makro lainnya.

HASIL & PEMBAHASAN

UMKM

Usaha Mikro (UMI), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) memiliki defenisi yang bervariasi, menurut beberapa sumber. Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menekop & UKM) mendefinisikan bahwa usaha kecil (UK), termasuk usaha mikro (UMI) adalah suatu badan usaha perorangan maupun berbadan hukum yang memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan) sebanyak-banyaknya Rp. 200 juta dan atau mempunyai nilai output atau hasil penjualan-rata-rata pertahun sebanyak Rp.1 miliar dan usaha tersebut berdiri sendiri. Sedangkan badan usaha yang memiliki kekayaan (tidak termasuk tanah dan bangunan) lebih besar dari Rp.200 juta sampai dengan 10 miliar dikategorikan sebagai usaha menengah (UM). Badan usaha yang memiliki nilai omzet kekayaan lebih dari 10 miliar dikelompokkan menjadi usaha besar.

Badan Pusat Statistik (BPS-2012) mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan (Tambunan, 2003). Usaha Mikro (UMI) adalah perusahaan (baik yang berbadan hukum atau tidak) yang mempunyai tenaga kerja 1-4 orang termasuk pemilik usaha). Jika tenaga kerjanya berkisar antara 5-19 orang, disebut sebagai Usaha Kecil (UK). Sedangkan perusahaan baik (berbadan hukum dan atau tidak) yang mempekerjakan lebih dari 19 orang, dikategorikan sebagai usaha yang berskala Usaha Besar (UB). Bank Dunia juga mendefinisikan skala usaha berdasarkan jumlah tenaga kerja (Yustika, 2006) : (1) UMI, jumlah tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, (2) UK, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sebanyak kurang dari 50 orang, (3) UM, jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan adalah kurang dari 300 orang. Pada Tabel 1 ditampilkan batasan tentang UKM, secara lengkap dari beberapa sumber.

Selanjutnya dijelaskan bahwa dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok adalah : 1) *Livelihood Activities*, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan

kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh, pedagang kaki lima. 2) *Micro Enterprise*, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. 3) *Small Dynamic Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. 4) *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar.

Karakteristik UMKM

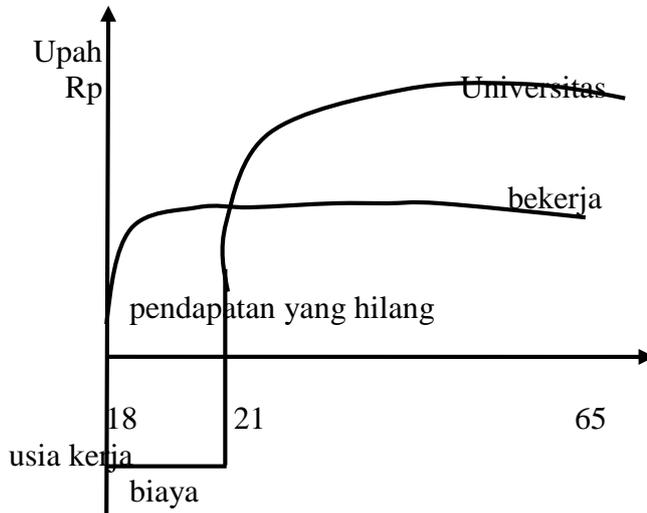
Memahami akan betapa pentingnya peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perhatian pemerintah terhadap UMKM sangat besar. Namun demikian persoalan-persoalan yang melilit para pelaku UMKM tidak pernah tuntas. Persoalan-persoalan klasik, yang sekaligus sebagai penciri dari UMKM dikelompokkan menjadi :

Aspek Internal

Aspek Sumberdaya Manusia (SDM)

Pendidikan SDM sebagai sebuah investasi, akan dinikmati hasilnya oleh yang bersangkutan dan atau oleh perekonomian setelah beberapa tahun kemudian. Besar kecilnya hasil atau kemanfaatan tergantung kepada tingginya pendidikan. Tenaga kerja yang berpendidikan Tinggi (Sarjana-S1), dapat memiliki produktivitas yang lebih tinggi sehingga akan memiliki Gaji/upah yang relatif lebih besar dari yang tamat SMU kebawah (Gambar 3). Seseorang yang memutuskan untuk masuk dalam pasar dengan ijazah SMU/K pada usia 18 tahun ia akan langsung menerima jumlah gaji yang relatif lebih rendah jika tamat Sarjana. Namun jika memutuskan untuk masuk kuliah, dalam usia 18-21 tahun berarti ia akan menanggung sejumlah biaya kuliah baik bersifat langsung, maupun biaya tidak langsung termasuk kehilangan pendapatan karena kuliah. Pada usia 21 tahun tamat Sarjana ia masuk dalam pasar kerja dengan menerima tingkat upah/gaji yang relatif lebih tinggi dari tamat SMU/K, akselerasi kenaikan gaji lebih cepat jika tamat

Sarjana. Namun pada usia pensiun, 65 tahun jumlah gaji yang akan diperoleh menjadi berkurang sehingga kurvanya cenderung menurun (Gambar 3).



Sumber : Santoso, 2012

Gambar 3 Perbedaan Tingkat Upah antara lulusan PT, dan SMU/K

Salah satu karakteristik dari pelaku UMKM adalah rendahnya kualitas, dicerminkan oleh rendahnya pendidikan formal yang ditamatkan. Sebuah penelitian di Surabaya yang dilakukan oleh Subaedi dan Ardiana, (2007) menemukan bahwa dari 150 responden pelaku UKM, 73 persennya berpendidikan SLTA, dan atau lebih rendah. Sedangkan Sarjana/Diploma, 26 persen, dan 0,67 atau 1 orang berpendidikan Magister. Kecenderungan yang sama juga terjadi secara nasional, bahwa mereka yang bekerja dalam sektor UMKM ini lebih banyak berpendidikan rendah, ditelusuri melalui jumlah unit usaha UMKM berdasarkan sektor ekonomi. Pada tahun 2001 unit usaha UMKM di sektor pertanian mencapai angka 23,76 juta, melebihi dari sektor ekonomi lainnya (Tambunan, 2003). Pengolahan dalam sektor pertanian umumnya masih bersifat tradisional, sehingga lebih banyak ditangani oleh mereka yang berpendidikan rendah, paling tinggi tamat SLTA, sama seperti yang ditemukan oleh Subaedi, dan Ardiana, (2007).

Kondisi inilah yang menyebabkan nilai tambah yang disumbangkan oleh sektor

UMKM terhadap PDRB relatif lebih kecil dibanding, dengan kontribusi dari sektor Usaha Besar (UB)/sektor Industri.

Aspek Permodalan

Tidak seperti UB, usaha di UMKM membutuhkan modal yang relatif kecil, sehingga lebih terjangkau pelaku UMKM. Kadin & The Asia Foundation (1988) mencatat 90,36 persen pelaku industri rumah tangga memiliki modal sendiri, sedangkan modal pinjaman hanya 3,20 persen. Menariknya bahwa pelaku UMKM lebih memilih meminjam dari sektor non perbankan (lain-lain) sebesar 79,35 persen, lebih tinggi dari yang meminjam melalui Bank, 18,79 persen. Padahal suku bunga yang ditawarkan oleh nonperbankan relatif lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh pihak perbankan. Terjadi karena pelaku UMKM umumnya tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan formal ketika berhadapan dengan sektor perbankan pada Tabel 2.

Aspek Management

Manajemen usaha dalam UMKM bersifat tradisional. Aktivitas yang dilakukan berdasarkan kebiasaan yang mungkin bersifat turun-temurun. Pola manajemen yang diterapkan masih berifat keluarga. Tidak ada pembagian tugas yang jelas diantara para pekerja, mengakibatkan pekerjaan dapat dilakukan secara serampangan dan tumpang tindih. Tidak juga memiliki cash flow, mengakibatkan tidak diketahui secara pasti apakah hasil usahanya menghasilkan untung atau rugi. Cara kerja semacam ini mematikan unsur kreativitas. Akibat dari kebiasaan ini maka tidak heran bahwa produktivitas dan nilai tambah UMKM terhadap perekonomian masih relatif rendah jika dibanding dengan UB, meskipun jumlah pelaku dan jenis usaha UMKM melebihi dari UB.

Aspek Mentalitas (Entrepreneurship)

Masih rendahnya produktivitas UMKM tersebut disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah rendahnya jiwa wirausaha para pelaku UMKM. Wirausaha adalah orang-orang yang selalu melakukan upaya kreatif dan

inovatif dengan jalan mengembangkan ide dan meramu sumberdaya untuk menemukan peluang (*opportunity*), dan perbaikan (*preparation*) hidup (Prawirokusumo, 1997).

Karakter seorang wirausaha adalah memiliki semangat juang yang tinggi, pantang menyerah, kerja keras, dan selalu berinovasi. Schumpeter menunjuk, lima macam indikator yang dikelompokkan dalam kegiatan berinovasi (Arsyad, 1992) adalah : *pertama* diperkenalkan produk baru yang sebelumnya tidak ada. *Kedua* diperkenalkan cara/metode berproduksi baru. Metode berproduksi baru harus menjawab masalah hal efisiensi dan kualitas produk. *Ketiga*, pembukaan pasar baru, bagi produk yang dihasilkan. Pasar dapat berupa pasar lokal, dan atau pasar luar negeri (ekspor). Pasar yang luas dapat menunjang meningkatkan produktivitas dan keuntungan sebagai awal untuk terjadi penumpukkan modal dan investasi untuk pembangunan. Dua hal yang dipenuhi untuk perluasan pasar adalah efisiensi dan kualitas. Efisiensi berdampak pada rendahnya harga jual, sedangkan kualitas merujuk kepada mutu barang. Banyak barang produksi dalam negeri kalah bersaing dengan produksi luar negeri karena tidak memenuhi dua unsur ini secara bersamaan. *Keempat* penemuan sumber-sumber bahan mentah baru, dan *Kelima* perubahan organisasi industri untuk efisiensi. Meredith, dalam Suprojo (1999-35) mengemukakan bahwa bentuk ketata kelakuan dan ciri atau karakter seorang wirausaha terdapat pada tabel 3.

Aspek Legalitas Usaha

Pedagang kaki lima(PKL), kios-kios, dan warung-warung adalah sebagian contoh usaha (UMKM) yang banyak tidak memiliki izin usaha. Terjadi karena banyak hal diantaranya adalah ketidaktahuan dan ketidakmampuan untuk mengurus izin usaha, dan atau karena tidak memiliki tempat usaha yang relatif permanen. Hal inilah yang dapat menjadi salah satu ganjalan untuk berurusan dengan pihak perbankan. Hasil Survey Usaha Terintegrasi, (2000) yang dilakukan oleh BPS melaporkan bahwa terdapat sekitar 15,0 juta usaha yang tidak berbadan hukum di luar sektor pertanian

(Tabel 4). Sebagian besar terdapat di sektor perdagangan(58 %), menyusul sektor industri(17.35%), sektor angkutan dan komunikasi (12,38%), lembaga keuangan (10.86) dan terakhir adalah sektor pertambangan(1,70%).

Keterbatasan Sarana & Prasarana

Keterbatasan kepemilikan sumberdaya sarana dan prasarana, menjadi kesulitan tersendiri yang mengganggu produktivitas UMKM. Produktivitas merupakan rasio antara input dengan output. Produktivitas tinggi jika output yang dihasilkan lebih besar dari input, tetapi jika terjadi sebaliknya berarti produktivitas UMKM yang bersangkutan rendah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Susilo dan Krisnadewara (2007) menyatakan bahwa, umumnya UKM di Yogyakarta, pasca gempa berproduksi dengan fasilitas/peralatan terbatas, berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas, berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas, berproduksi dengan modal finansial terbatas. Keterbatasan ini telah berdampak negatif terhadap produktivitas dan nilai tambah yang dihasilkan oleh UMKM

Aspek Eksternal

Aspek Pemasaran

Pasar menjadi penting sekali untuk menunjang produktivitas dan margin UMKM. Banyak sekali usaha UMKM mengalami macet karena hasil kerajinannya menumpuk di gudang karena tidak memiliki pasar. Dalam pengertiannya bahwa pasar adalah tempat atau ruang untuk terjadinya tukar menukar barang dan jasa. Dari segi produk, dikenal tiga macam pasar : (1) pasar modal, (2) pasar tenaga kerja, dan (3) pasar barang. Produk yang ditawarkan dalam pasar modal adalah uang, dan atau surat-surat berharga yang berlikuid. Pasar tenaga kerja, berhubungan dengan tenaga kerja, dan pasar barang berhubungan dengan jumlah output barang dan jasa. Dalam pasar manapun dikenal dua buah kekuatan yang saling berinteraksi : (1) permintaan(*demand*), dan (2) penawaran(*supply*). Permintaan adalah **pelanggan**, (*customer*) juga dapat disebut sebagai **pasar** (*market*) yang membutuhkan produk yang dihasilkan. Pasar dapat berasal

dari dalam negeri(lokal) maupun berasal dari luar negeri. Makin besar pasar/pelanggan atas sebuah produk makin baik, karena dapat meningkatkan keuntungan dan mendorong untuk terjadinya pengembangan usaha.

Terdapat dua hal yang mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap produk yang ditawarkan : (1)harga (relatif) murah, tetapi (2)kualitas/mutu barang terjamin. Produknya bermutu, dan dijual dengan harga yang relatif murah akan mendapat perhatian yang lebih besar dari pelanggan. Sedangkan Penawaran (*supply*) dapat didefenisikan sebagai sekelompok orang atau badan yang sehari-harinya bekerja/bertugas untuk mengadakan barang/jasa atau meningkatkan nilai tambah atas sesuatu barang. Perubahan wujud atau bentuk, atas sesuatu barang merupakan tugas dari kelompok ini. Pelaku-pelaku UMKM termasuk dalam kelompok ini. Mereka adalah orang-orang yang berjiwa bisnis(wiraswasta). Produk-produk industri kerajinan rumah tangga (IKRT) seperti : anyaman, tenun ikat, musik sasando, dan atau produk yang berhubungan dengan sektor pertanian sudah menembus sampai pasar luar negeri. Hasil produksi UKM yang diekspor ke luar negeri mengalami peningkatan dari Rp. 122,3 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp 142,8 triliun pada tahun 2007, namun demikian peranannya terhadap total ekspor nonmigas nasional sedikit menurun dari 20,2 persen pada tahun 2006 menjadi 20,0 persen pada tahun 2007. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan ekspor dari hasil produksi UB seperti hasil industri makanan, minuman dan tembakau, industri tekstil, dan industri bahan kimia industri.

Bila dirinci menurut sektor, pada tahun 2007 sebagian besar hasil produksi UKM yang diekspor yaitu 89 persen berupa komoditi yang dihasilkan sektor industri, diikuti oleh sektor pertanian sebesar 9,8 persen, dan sektor pertambangan sebesar 1,2 persen. Sedangkan pada UB peranan komoditi sektor industri sebesar 82,3 persen, diikuti sektor pertambangan sebesar 17,5 persen, dan sektor pertanian 0,2 persen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.

Aspek Lingkungan Usaha

Kemajuan usaha UMKM sangat tergantung kepada lingkungan. Lingkungan dapat diartikan sebagai ruang (*space*) yang memiliki karakteristik-karakteristik berupa sumberdaya alam(tanah dengan segala isinya), sumberdaya manusia, norma, adat dan kebiasaan (budaya) termasuk aturan-aturan yang berlaku dalam wilayah yang bersangkutan. Tiap-tiap karakteristik ini merupakan sebuah ekosistem yang saling menunjang tetapi juga saling meniadakan. Terganggunya sebuah karakteristik dapat berakibat negatif bagi kelangsungan hidup makhluk hidup yang lain.

UMKM yang berada di lingkungan masyarakat kota mempunyai peluang untuk berkembang lebih besar dari UMKM yang berada di wilayah pinggiran(*marginal*). Masyarakat kota umumnya adalah orang-orang yang bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang relatif tinggi. Tingkat atau pola konsumsi atau kecenderungan untuk mengkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume*) juga relatif lebih tinggi dari masyarakat pedesaan(*marginal*).

Lingkungan dapat juga dimaknai dalam bentuk perhatian pemerintah terhadap pengembangan UMKM, melalui kebijakan-kebijakan, dan atau peraturan-peraturan. Walaupun diyakini bahwa tidak semua peraturan/ketentuan dapat menunjang kinerja UMKM. Disebutkan oleh Kuncoro, (2000) bahwa sejak tahun 1983, pemerintah secara konsisten telah melakukan berbagai upaya deregulasi untuk penyesuaian struktural dan restrukturisasi perekonomian. Kendati demikian, banyak yang mensinyalir deregulasi di bidang perdagangan dan investasi tidak memberi banyak keuntungan bagi perusahaan kecil dan menengah; bahkan justru perusahaan besar dan konglomeratlah yang mendapat keuntungan. Studi empiris membuktikan bahwa pertambahan nilai tambah ternyata tidak dinikmati oleh perusahaan skala kecil, sedang, dan besar, namun justru perusahaan skala konglomerat, dengan tenaga kerja lebih dari 1000 orang, yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun per rata-rata perusahaan (Kuncoro & Abimanyu, 1995).

Kebijakan tentang kemiteraan antara perusahaan besar dengan IKRT dalam wujud Bapak angkat, juga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hasil Survei Industri Kecil dan Kerajinan Rumah tangga yang dilakukan oleh BPS (1994) juga menemukan bahwa dari 125 ribu unit industri kecil hanya sekitar 6% saja yang telah mempunyai Bapak Angkat, sedangkan bagian terbesar (94%) belum atau tidak mempunyai Bapak Angkat. Dari yang mempunyai Bapak Angkat tersebut, lebih dari setengahnya (55,02%) mempunyai keterkaitan pemasaran dengan Bapak Angkat. Keterkaitan terbanyak kedua adalah masalah permodalan 44,42%, produksi 32%, bahan baku 28% dan yang paling kecil adalah keterkaitan yang berhubungan dengan masalah bimbingan pengelolaan usaha atau manajemen yaitu kurang dari 3% (Kuncoro, 2000).

Aspek Teknologi

Teknologi adalah cara/metode berproduksi. Cara berproduksi yang lazim digunakan oleh UMKM bersifat sederhana, kadang merupakan kebiasaan turun-temurun. Hampir tidak ada upaya untuk meningkatkan produktivitas dengan cara merubah metode produksi. Walaupun demikian nilai tambah UK terhadap pembentukan PDB lebih besar dari UM dan UB. Terjadi bukan karena produktivitas tenaga kerja yang tinggi melainkan karena jumlah penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak terkonsentrasi di UK daripada UM dan atau UB. Pada tahun 1997, pangsa PDB dari UK sebesar 40,45 persen. Ketika terjadi krisis(1998), jumlahnya naik sedikit menjadi 42 persen. Sedangkan pangsa dari UM terhadap PDB pada tahun 1997 hanya 17,41 persen(tanpa migas), dan tahun 1998 saat terjadi krisis, jumlahnya menurun menjadi 16,03 persen(Tambunan, 2003).

Perkembangan UMKM

Tabel 6 memperlihatkan bahwa dalam tahun 2005-2009 jumlah UMKM terus mengalami peningkatan, jumlahnya melebihi dari jumlah usaha yang berskala besar(UB) pada setiap periode. Tahun 2005 tercatat 47,02 juta UMKM meningkat menjadi 49,02 juta(2006) dan tahun 2009 bertambah menjadi 52,76 juta.

Sedangkan UB mengalami kecenderungan menurun dari 5022 unit usaha(2005) menjadi 4577 di tahun 2006. Pada tahun 2009 berkurang menjadi 4.677 unit usaha yang berskala besar.

Jenis UK tidak hanya berada dalam satu atau dua sektor melainkan tersebar pada seluruh sektor ekonomi. Tabel 7 memperlihatkan bahwa dalam tahun 1997-2001 jumlah UK terbanyak berada di sektor pertanian, menyusul sektor perdagangan, hotel dan restoran (dan yang paling sedikit terjadi di sektor Listrik, Gas dan air bersih. Tahun 1997 dari total UK 39,70 juta, sektor pertanian menyumbang 56,70 persen, (22,51 juta) menyusul sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,15 persen(9,98 juta). Dua sektor ini menyumbang paling banyak pada setiap tahunnya hingga tahun 2001. Sumbangan terkecil berasal dari sektor Listrik, Gas dan air bersih, besarnya makin menurun dari 0,03 persen(13,4 ribu) (1997), menjadi 0,02 persen(7,3 ribu) pada tahun 1998, dan menurun lagi menjadi 0,01 persen dalam tiga tahun terakhir. Terjadi karena tidak banyak orang yang memiliki kemampuan untuk berusaha dalam sektor ini.

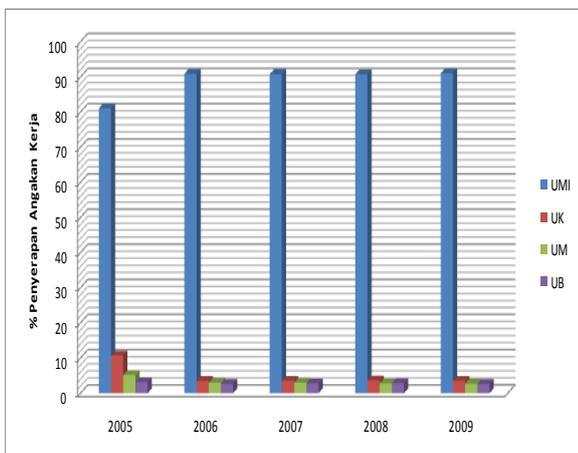
UMKM dan Perekonomian

Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997 sektor ini mampu bertahan dibanding dengan sektor usaha yang berskala besar. Produksi UMKM menggunakan bahan-bahan lokal, dengan teknologi yang relatif sederhana dan tidak ada hubungan dengan sektor luar negeri. Krisis ekonomi dunia tidak berdampak langsung kepada aktivitas sektor UMKM. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dilihat beberapa indikator sebagai berikut :

Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah penduduk yang berusia produktif (15-64 tahun) yang siap berpartisipasi dalam pasar kerja. Dalam ekonomi kependudukan dikenal pula istilah angkatan kerja, adalah penduduk yang sudah bekerja dan penduduk yang belum dapat tertampung dalam pasar kerja, tetapi sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan, selanjutnya dikenal dengan sebutan,

peganggur. Pada bulan Februari 2011, jumlah angkatan kerja mencapai 119,4 juta orang naik sebesar 2,9 juta orang dibanding keadaan Agustus 2010 dan naik 3,4 juta orang dibanding keadaan Februari 2010. Penduduk yang bekerja pada Februari 2011 bertambah sebesar 3,1 juta orang dibanding keadaan Agustus 2010, dan bertambah 3,9 juta orang dibanding keadaan setahun yang lalu (Februari 2010). Jumlah penganggur pada Februari 2011 mengalami penurunan sebesar 200 ribu orang jika dibanding keadaan Agustus 2010, dan mengalami penurunan 470 ribu orang jika dibanding keadaan Februari 2010. Peningkatan jumlah tenaga kerja serta penurunan angka pengangguran telah menaikkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 2,13 persen selama periode satu tahun terakhir. Dari 104 juta orang yang bekerja di tahun 2009, tersebut, 97 persennya bekerja di sektor UMKM, sedangkan 3 persennya lainnya bekerja di sektor usaha yang berskala besar (UB) terlihat pada Tabel 8 dan Gambar 4).



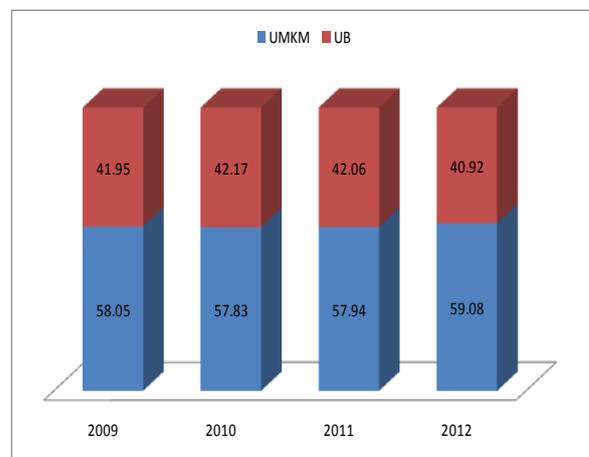
Gambar 4 Persentase Penyerapan Angkatan Kerja Berdasarkan Skala Usaha

Produk Domestik Reginal Bruto(PDRB)

PDRB merupakan indikator untuk menilai kinerja sebuah perekonomian. Angka PDRB pada akhirnya dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi, dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Atas alasan ini maka tidak heran jika pembangunan cenderung difokuskan

kepada daerah-daerah yang memiliki potensi untuk menciptakan linkage bagi sektor-sektor ekonomi lainnya untuk tumbuh. Titik titik pertumbuhan inilah akan menjadi pemicu bagi pertumbuhan sekonomi secara keseluruhan.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah usaha mikro, kecil dan menengah(UMKM). Pertumbuhan PDB yang dihasilkan oleh sektor ini relatif lebih besar dari yang dihasilkan oleh sektor yang berskala besar (UB) rata-rata diatas 50 persen dibandingkan dengan yang disumbangkan oleh sektor UB, dalam periode 2009-2012.



Sumber : www.scribd.com/doc/147913127/data-umkm-indonesia-2009-2012/ diakses 15 Maret 2016

Gambar 5 Persentase PDB UMKM dan UB Tahun 2009-2012(harga konstan)

Kondisi ini bukan karena sektor UMKM memiliki nilai tambah(value added) yang lebih besar, melainkan karena jumlah jenis usahanya jauh melebihi dari UB. Misalnya pada tahun 2011 jumlah unit usaha UMKM mencapai 55.206.444 unit, sedangkan usaha berskala besar (UB), hanya mencapai angka 4952 unit. Jumlah ini meningkat menjadi 56534.592 unit usaha UMKM, dan 4968 unit usaha UB di tahun 2012. Artinya pangsa pasar UMKM hampir mencapai 100 persen, dalam rentangan waktu tersebut(Tabel 9).

UMKM Terhadap Sektor Eskport non Migas Kecilnya nilai tambah(value added) yang disumbangkan oleh sektor UMKM tidak hanya dirasakan oleh PDRB, dan pertumbuhan

ekonomi, tetapi juga dialami oleh ekspor non migas. Pada tahun 2007 sektor UMKM hanya mampu menyumbang 20 persen (Rp.142822 Miliard) dari total ekspor non migas Rp.713416 Miliard. Tabel 9 secara rinci memperlihatkan bahwa dari total ekspor non migas Rp.142822 Miliard tersebut sektor industri menyumbang 89 persen, melebihi dari yang disumbangkan oleh sektor pertanian 9.8 persen, dan pertambangan sebesar 1.2 persen. Lain halnya dengan yang disumbangkan oleh skala usaha UB. Sektor ini menyumbang Rp. 570594 Miliard; paling banyak mendapat kontribusi dari sektor industri sebesar 82.3 persen, menyusul sektor pertambangan, 17.5 persen, dan 0.2 persen berasal dari sektor pertanian.

SIMPULAN & SARAN

Simpulan

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbukti lebih bertahan terhadap gempuran krisis ekonomi pada tahun 1997. Dalam berproduksi menggunakan teknologi yang relatif sederhana, memakai sumber-sumber lokal. Dari 104 juta orang yang bekerja di tahun 2009, tersebut, 97 persennya bekerja di sektor UMKM, sedangkan 3 persennya lainnya bekerja di sektor usaha yang berskala besar (UB) Walaupun demikian, nilai tambah yang dihasilkan untuk perekonomian (pertumbuhan ekonomi) terbilang rendah. Pertumbuhan PDB yang dihasilkan oleh sektor ini relatif lebih besar dari yang dihasilkan oleh sektor yang berskala besar (UB) rata-rata diatas 50 persen dibandingkan dengan yang disumbangkan oleh sektor UB, dalam periode 2009-2012. Namun

kondisi ini bukan karena sektor UMKM memiliki nilai tambah (*value added*) yang lebih besar, melainkan karena jumlah jenis usahanya jauh melebihi dari UB. Misalnya pada tahun 2007 jumlah unit usaha UMKM mencapai 49.840.489 unit, sedangkan usaha berskala besar (UB), hanya mencapai angka 4527 unit. Jumlah ini meningkat dari 48.779.151 unit usaha UMKM, dan 4398 unit usaha UB di tahun 2006. Rendahnya nilai tambah ini disebabkan oleh terbatasnya kemampuan berupa skill, modal, informasi pasar, dan manajemen) para pelaku UMKM.

Saran

Pemerintah harus terus melakukan pelatihan, dan bimbingan kepada para pelaku UMKM berkaitan dengan (a) peningkatan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM; (b) peningkatan motivasi dan mental berwiraswasta bagi pelaku UMKM; (c) menciptakan peluang pasar bagi produk yang dihasilkan pelaku UMKM dan (d) managerial/pengelolaan UMKM secara profesional. Sedangkan bantuan permodalan kepada pelaku UMK hendaknya terus dilakukan oleh Pemerintah. Pemerintah harus terus melakukan kampanye merubah pola pikir masyarakat terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Perusahaan-perusahaan BUMN dapat ditunjuk sebagai Bapak Angkat terhadap UMKM-UMKM tertentu. Selain itu, peran Koperasi hendaknya ditingkatkan sebagai penampung produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

Arsyad Lincolin. 1992. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi 2. Yogyakarta. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2012. *Perkembangan UMKM Periode 1997-2012*. <http://www.bps.go.id/diakses> 10 Maret 2016.

BPS, dan Kementerian Koperasi, dan UKM 2003. <http://smecda.com/wp-content/uploads/2015/diakses> 15 Februari 2016.

Berita Resmi Statistik No. 28/05/Th. XI, 30 Mei 2008. www.bps.go.id/

[boutus.php](#)/diakses 14 Maret, dan 30 Mei 2016.

Ichsan Muhamad. 2004. *Mengembalikan Laju Pertumbuhan Ekonomi dalam Jangka Menengah: Peran Usaha Kecil dan Menengah*. Jurnal Analisis Sosial. Usaha Kecil dan Masa Depan Perekonomian Indonesia. Vol.9 No.2 Agustus 2004. Bandung. Yayasan Akatiga.

Keragaman Defenisi UKM di Indonesia. <http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/>diakses 14 Maret 2016.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. www.sintak.unika.ac.id/files/struktur_ukm.pdf. *Usaha Kecil di Indonesia. Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*.

Kuncoro, Mudrajad. 2000. *UMKM Menghadapi Pasar Bebas*. <http://www.academia.edu/>diakses 4 Maret 2016.

Maipita, Indra. 2014. *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta UPP STIM YKPN.

Prawirokusumo. 1997. *Hakekat Kewirausahaan*. <http://adesymas.blogspot.com/>Diakses 22 Februari 2016.

Santoso, Rokhedi Priyo. 2012. *Ekonomi Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.

Subaedi, dan Ardiana Brahmayanti. 2007. *Kompetensi UKM, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja UKM di Surabaya*. <http://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/>diakses 21 Februari 2016

Suprodjo, Pusposutardjo. 1999. *Pengembangan Budaya Kewirausahaan Melalui Matakuliah Keahlian*. Makalah, Disampaikan dalam Semiloka Wawasan Entrepreneurship IKIP Yogyakarta, Tanggal 17 dan 19 Juli 1999.

Sulistiyastuti Dyah Ratih. 2004. www.journal.uui.ac.id/index.php/jep/article. *Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Vol. 9 No. 2, Desember 2004.

Susilo dan Krisnadewara. 2007. *Strategi Pengembangan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. <http://publiskasihilmiah.um.s.ac.id/>diakses 2 Maret 2016.

Tambunan Tulus T.H. 2003. *Perekonomian Indonesia-Beberapa Masalah Penting*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Yustika Ahmad Erani. 2006. *Perekonomian Indonesia. Deskripsi, preskripsi, & Kebijakan*. Malang-Jawa Timur. Bayu Media Publishing.

Tabel 1 Batasan UKM Berdasarkan Beberapa Sumber

No	Instansi	Jenis Usaha	Kriteria
1	Kementerian Neg.Kop. dan usaha kecil menengah (Menegkop dan UKM)	UK+UMI	Memiliki kekayaan paling banyak Rp.200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Rp.1 M
		UM	Memiliki kekayaan bersih antara Rp.200 Juta-Rp.10 M, tidak termasuk tanah dan bangunan
2	Badan Pusat Statistik (BPS) Def. UKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja	UK	Memiliki jumlah tenaga kerja antara 5-9 orang
		UM	Memiliki jumlah tenaga kerja antara 20-99 orang
3	SK.Menteri Keuangan No. :316/KMK.016/1994/ Tgl. 27 Juni 1994	UK	Usaha perorangan atau badan usaha, dengan omset penjualan/ tahun paling tinggi Rp.600 juta, atau aset aktiva paling tinggi Rp.600 juta, diluar tanah, dan dan bangunan. Jenis usahanya terdiri atas: 1.bidang usaha(Fa.,CV.,PT, dan Koperasi), dan 2.usaha perorangan, misalnya : (pengrajin/industri rumah tangga, petani, peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang, dan jasa).
		UK	1.Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50 juta sampai Rp.500 juta termasuk tanah, bangunan tempat usaha. 2.Memiliki omset penjualan/tahun antara Rp.300 sampai Rp. 2,5 M
		UM	1.Memiliki kekayaan antara Rp.500 juta sampai Rp.10 M termasuk tanah & bangunan tempat usaha 2.Memiliki kekayaan bersih antara Rp 500 juta sampai Rp.10 M tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan 3.Memiliki hasil penjualan/tahun antara Rp2.5M -Rp 50 M
5	Bank Indonesia	UM (SK Dir BI No 31/24/ KEP/ Dir tgl 5 Mei 1998)	1.Usaha yang dijalankan oleh rakyat miskin, atau mendekati miskin 2.Dimiliki oleh keluarga sumber daya lokal, dan teknologi sederhana 3.Lapangan usaha mudah untuk exit dan entry
		UM (SK Dir BI No 30/45 /Dir/ UK/tgl 5 Jan 1997)	1.Aset < Rp 5 M untuk industry 2. < Rp 600 juta diluar tanah & bangunan 3.Omset tahunan < Rp 3 M

Sumber : <http://infoukm.wordpress.com/2008/08/11/keragaman-definisi-ukm-di-indonesia/> diakses 14 Maret 2016

Tabel 2 Klasifikasi Modal UMKM berdasarkan Sumber Perolehan(%)

Asal Modal	Industri Kecil Rumah Tangga	Industri Kecil
Modal sendiri	90.36	69.82
Modal pinjaman	3.20	4.75
Modal sendiri dan pinjaman	6.44	25.43
Jumlah	100.00	100.00
Asal Modal Pinjaman		
Bank	18.79	59.78
Koperasi	7.09	4.85
Institusi lain	8.25	7.63
Lain-lain	79.35	32.16

Sumber : Kementrian Koperasi, dan UKM (2003)

Tabel 3 Bentuk Ketatakelakuan Ciri-ciri Karakter Wirausaha

Ciri-ciri Kewirausahaan	Bentuk Tata-Kelakuan
Percaya diri	1.Bekerja penuh keyakinan 2.Tidak ketergantungan dalam melakukan Pekerjaan
Berorientasi pada tugas dan Hasil	1.Memenuhi kebutuhan akan prestasi 2.Orientasi pekerjaan berupa laba, tekun dan tabah, bertekad
Berani mengambil resiko	1.Berani dan mampu mengambil resiko kerja 2.Menyukai pekerjaan yang menantang
Berjiwa kepemimpinan	1.Bertingkah laku sebagai pemimpin yang terbuka 2.Mudah bergaul dan bekerjasama dengan orang lain
Berpikir kearah hasil (manfaat)	1.Kreatif dan inovatif 2.Luwes dalam melaksanakan pekerjaan 3.Mempunyai banyak sumberdaya 4.Serbabisa dan berpengetahuan luas
Keorisional	1.Berpikir menatap ke depan 2.Perpektif

Sumber : Suprojo Pusposutardijo,1999

Tabel 4 Jumlah UMKM Tidak Berbadan Hukum Menurut Wilayah dan Lapangan Usaha Tahun 2000

Wilayah	1	2	3	4	5	Jumlah
Sumatera	43.647	328.143	1.362.701	245.438	248.589	2.228.518
Jawa-Bali	103.530	1.759.758	6.054.034	1.351.083	1.190.133	10.458.535
Nusa Tenggara	22.024	191.731	267.117	46.160	27.116	554.148
Kalimantan	49.658	102.667	401.398	82.551	79.053	715.337
Sulawesi	26.441	208.558	539.657	126.451	78.038	979.055

Maluku & Irian Jaya	3.542	7.837	25.896	3.466	4.101	44.842
Jumlah	248.842 (1.70%)	2.598.704 (17.35%)	8.650.713 (58%)	1.855.149 (12.38%)	1.627.030 (10.86%)	14.980.438 (100%)

Sumber : Tambunan, 2003

Ket.: (1)Pertambangan rakyat, dan penggalian, listrik non PLN dan konstruksi
 (2)Industri kecil dan kerajinan rumah tangga
 (3)Perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan jasa akomodasi
 (4)Angkutan dan komunikasi
 (5)Lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, dan jasa-jasa

Tabel 5 Nilai Ekspor Nonmigas menurut Sektor Ekonomi

Tahun 2007 (milliar Rp)

Lapangan Usaha	UKM		UB		Jumlah	%
	Nilai	%	Nilai	%		
1.Pertanian	13.998	9.8	1.231	0.20	15.228	2.10
2.Pertambangan	1.717	1.2	99.827	17.50	101.545	14.20
3.Industri	127.107	89.0	469.536	82.30	596.643	83.70
Jumlah	142.822	100	570.594	100	713.416	100

Sumber : BPS-Berita Resmi Statistik, No.: 28/05/Thn.XI, 30 Mei 2008

Tabel 6 Jumlah UMKM dan UB Tahun 2005-2009

Skala Usaha	Tahun				
	2005	2006	2007	2008	2009
UMI	45217567	48512438	49608953	50847771	52176795
UK	1649008	472602	498565	522124	546675
UM	105487	36763	38282	39717	41133
Jumlah	47017062	49021803	50145800	51409612	52764603
UB	5022	4577	4463	4650	4677
Total	47022084	49026380	50150263	51515262	52769280

Sumber : www.smecda.com.deputi/menu/files/diakses 21 Januari 2016

Tabel 7 Persebaran UK dalam Sektor Ekonomi

Sektor	Tahun				
	1997	1998	1999	2000	2001
1	22511588	23097871	23174579	23516865	23756018
2	204413	137284	132617	134748	140567
3	2817379	2104856	2526163	2713857	2874383
4	13434	7319	4492	4835	5174
5	199253	122945	102332	110183	111539
6	9986510	8325351	8688215	9212900	9673872

7	1852401	1507629	1707762	1867288	1995727
8	71334	18519	24243	25423	26171
9	2048349	1439915	1499206	1535251	1554322
Jumlah	39704661	36761689	37859507	39121350	40137773

Sumber : Tambunan, 2003

Keterangan sektor :

1. Pertanian, peternakan, kehutanan, & perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Listrik, gas, dan air bersih
5. Bangunan
6. Perdagangan, hotel, dan restoran
7. Pengangkutan dan komunikasi
8. Keuangan, persewaan, dan jasa
9. Jasa-jasa

Tabel 8 Persentase Penyerapan Angkatan Kerja Berdasarkan Skala Usaha Tahun 2005-2009

Tahun	Skala Usaha			
	UMI	UK	UM	UB
2005	81.07	10.67	5.12	3.15
2006	90.84	3.48	2.99	2.70
2007	90.78	3.52	2.97	2.73
2008	90.73	3.64	2.78	2.85
2009	91.03	3.56	2.71	2.70

Sumber : www.snecta.com/deputi/menu/file

Keterangan : UMI = Usaha mikro

UK = Usaha kecil

UM = Usaha menengah

UB = Usaha besar

Tabel 9 Jumlah unit usaha UMKM, dan UB Tahun 2010-2012

Tahun	Jumlah unit usaha/Skala usaha				
	UMKM	%	UB	Jumlah	%
2009	52764603	99.99	4677	52769280	0.09
2010	53823732	99.99	4838	52828570	0.09
2011	55206444	99.99	4952	55211396	0.09
2012	56534592	99.99	4968	56539560	0.09

Sumber : www.scribd.com/doc/147913127/data-umkm-indonesia/diakses 15 Maret 2016

Tabel 10 Eksport Non Migas Menurut Skala Usaha Tahun 2007 (Mil.Rp)

Lapangan Usaha	UKMM		UB		Jumlah	
	Nilai	%	Nilai	%		
1.Pertanian	13998	9.8	1231	0.2	15228	2.1
2.Pertambangan	1717	1.2	99827	17.5	101545	14.2
3.Industri	127107	89.0	469536	82.3	596643	83.7
Total	142822	100	570594	100	713416	100

Sumber : Berita Resmi Statistik No.:28/05/Thn.XI, 30 Mei 2008/diakses 14 Maret 2016